

PROSIDING

Seminar Nasional & Call For Paper

IMPROVING MORAL INTEGRITY BASED ON FAMILY

MALANG, 28 MEI 2016

**PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
IMPROVING MORAL INTEGRITY BASED ON
FAMILY**

Proceeding Seminar Nasional dan Call for Paper
IMPROVING MORAL INTEGRITY BASED ON FAMILY

Prolog

Dr. Fabiola Hendrati, S.Psi., M.Si., Psikolog.

Keynote Speaker

Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog

Dr. MG. Adiyanti, M.S., Psikolog

Dr. Fabiola Hendrati, M.Si., Psikolog

Editor

Taufiqurrahman, S.Psi, MA

M. Untung Manara, S.Psi, MA

Khusnul Khotimah, S.Psi, MA

Nur Azizah, S.Psi., MA

Al Thuba Septa Priyanggarsi, S.Psi., M.. Ps

Ritna Sandri, S.Psi., M.. Ps

Fitria Rachmawaty, S.Psi., M.. Ps

Cetakan Pertama

Mei 2016



Diterbitkan oleh: **Unmer Press**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Merdeka Malang

Alamat Penerbit:

Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang Telp./Fax. (0341) 581056

Website: lppm.unmer.ac.id

E-Mail : lppm@unmer.ac.id

Dicetak oleh: Unmer Print

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk, rahmat dan bimbingan-NYA, sehingga seminar nasional ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar pada tanggal 28 Mei 2016, bertempat di ruang PPI(Pusat Pertemuan Ilmiah) lantai 3 Kantor Pusat Universitas Merdeka Malang.

Seminar ini merupakan wujud keprihatinan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang terhadap fenomena problem sosial di masyarakat yang berakar dari kemerosotan moral bangsa, sekaligus menjadi bentuk kepedulian untuk meminimalkan berbagai fenomena tersebut. Berbagai fenomena degradasi moral tersebut tidak lepas dari kualitas pribadi pelakunya. Keluarga merupakan unit terkecil & unit pertama pembentuk kepribadian manusia, termasuk kepribadian para pelaku degradasi moral tersebut. Maka, keluarga seharusnya menjadi unit preventif meluasnya fenomena degradasi moral tersebut di masa depan.

Buku proceeding Seminar Nasional ini berisi kumpulan paper dari para peserta call for paper yang lolos seleksi dan kemudian dipresentasikan dalam acara Seminar Nasional "Improving Moral Integrity Based on Family" pada tanggal 28 Mei 2016. Paper terpilih setelah melalui proses review dari team reviewer, dengan mempertimbangkan konsep pemikiran, kajian teoritis dan kajian praktis yang digunakan. Harapan Kami, Kumpulan karya paper ini dapat menambah wawasan keilmuan Psikologi pada umumnya dan menambah wacana penyelesaian problem disintegrasi moral di masyarakat.

Atas nama Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu terselenggaranya Seminar Nasional ini. Tentu saja segala proses Seminar Nasional ini tidak lepas dari kekurangan, Kami mohon maaf kepada semua pihak terkait atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam proses penyelenggaraan seminar nasional ini. Mari kita terus berkarya bagi peningkatan integritas moral bangsa.

Salam Sejahtera.

Malang, 28 Mei 2016
Dekan Fakultas Psikologi

DR. Fabiola Hendrati., S.Psi., M.Si.,
Psikolog

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
EDITOR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Moralitas Remaja Ditta Febrieta	1
Dampak Mata Pelajaran Penjasorkes terhadap Nilai- nilai Karater Siswa- siswi Risto Gerol Foekh	20
Hubungan Motivasi Berpretasi dan Integritas Moral dengan Sikap Mahasiswa terhadap <i>Plagiarism</i> Fitri Arlinkasari, Nurindah Fitria, & Dhaniar Gusna Fatimah	27
Perbedaan Kecurangan Akademik pada Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin Dita Rachmayani & Thoyyibah Sarirah	51
Studi Karakteristik Anak Jalanan dalam Upaya Penyusunan Program Pendidikan Moral pada Anak Jalanan di Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA) Sarita Candra Merida & Sarah Rachmawati	61
Pengaruh Pemaafan terhadap Harga Diri pada Wanita Pasca Melakukan Tindakan <i>Abortus</i> <i>Provocatus Criminalis</i> Sarah Fani Diantika & Fellianti Muzdalifah	78
Persepsi Lurah di Kota Kupang tentang Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini Yohana Krista Eka Tafuli, Beatriks Novianti Kiling-Bunga, Friandry Windisany Thoomaszen, & Indra Yohanes Kiling	91
Deskripsi Aksesibilitas Paternal pada Ayah dari Anak Usia Dini di Kupang Ratna Medeleyne Sailana, Friandry Windisany Thoomaszen, Beatriks Novianti Kiling-Bunga, & Indra Yohanes Kiling	111
Pembentukan Karakter Anak Melalui Pola Asuh <i>Otoritatif</i> Nur Lailiyah	124
Penggunaan <i>strategic family therapy</i> untuk mengatasi masalah komunikasi dalam keluarga Penggunaan <i>strategic family therapy</i> untuk mengatasi masalah komunikasi dalam keluarga Fitria Rachmawaty	134
Peranan Gaya Kelekatan terhadap Integritas Moral Siswa Sma di Jakarta Sari Zakiah Akmal	145
Pola Asuh: Sebuah Analisis Budaya Alifah Nabilah Masturah	163

Hegemoni Moralitas dalam Tuntutan Zaman Surahman & Yuriadi	171
Proses dan Faktor yang Mempengaruhi Pemaafan Remaja Atas Perselingkuhan Orang Tua Gustina Handayani & Rahma Yurliani	183
Penggunaan <i>Software Parental Control</i> dalam Mencegah Akses Situs Pornografi pada Anak Aulia Andika Putri	199
Pelatihan Asertivitas: Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak-Anak Nisa Fitriani	207
Peranan Lingkungan Keluarga dalam Upaya Mereduksi Misbehavior pada Remaja Nur Saqinah Galugu	218
Normalisasi Korupsi: Tinjauan Psikologi M. Untung Manara	229
Pengaruh Peringatan Kesehatan Bergambar dan <i>Smoking-Specific Locus of Control</i> terhadap Intensi Merokok Nurindah Fitria, Fitri Arlinkasari, & Muhammad Nur Abidin	237
Pendidikan Moral dalam Pembentukan <i>Moral Intelligence</i> di Lingkungan Keluarga dan Sekolah Sejak Usia Dini : Studi Literatur Andi Dian Diarfah	255
Optimalisasi Fungsi dan Peran Keluarga Pada <i>Dual-Career Family</i> Dede Fitriana Anattasia	266
Peran Coparenting sebagai Upaya Preventif terhadap Degradasi Moral Remaja Peran Coparenting sebagai Upaya Preventif terhadap Degradasi Moral Remaja Husnul Khotimah	284
Hubungan Perilaku Asertif dan Pola Asuh yang Demokratis Syahnur Rahman	291
Bentuk-Bentuk Nilai Rukun dalam Pernikahan Keluarga Jawa Dyah Purbasari Kusumaning Putri & Laila Listiana Ulya	298
Guru Bimbingan Belajar vs Orangtua: Potret Ketidaksiapan Orangtua dalam Mendidik Anaknya Wahyu Relisa Ningrum, Wahyu Widiyanto, Siti Mahmudah, & Arundati Shinta	312
Studi Kasus Pengelolaan Emosi pada Anak Tantrum di Taman Kanak-Kanak Tri Welas Asih, Dewi H. Harahap, Siti Mahmudah, & Arundati Shinta	324
Mindfulness dan Kepuasan Perkawinan sebagai Pondasi Ketahanan Keluarga Hally Weliangan, Warda Lisa, Ursa Majorsy, & Astri Nur Kusumastuti	337
Studi Literatur: Komunikasi Orang Tua – Anak dalam Mempengaruhi Sikap Remaja terhadap Seks Pra-Nikah Nur Ainy Sa'dijah	348

Profil dan Tingkat Agresivitas Remaja Anggota Geng Motor di Medan Evi Syafrida Nasution	355
<i>Unethical Behavior</i> dalam Perspektif Individu dan Organisasi Luvy K, Eva Nur Rachmah, & Fahyuni Baharuddin	371
Bimbingan Konseling Masalah Perilaku pada Remaja: Studi Kasus pada Siswa Sekolah SMP Negeri “XY” di Jakarta Devi Jatmika & Veny Mulyani	388
Membangun Keluarga Berintegritas di Jaman yang Bergegas M. J. Retno Priyani	402
Peran <i>Adversity Quetiont</i> , Keterampilan Berkomunikasi, dan <i>Well Being</i> pada Pasutri sebagai Upaya Pencegahan Degradasi Moral Ag.Krisna Indah Marhaeni	417
Penerapan Konseling Komunitas untuk mencegah Degradasi moral Pada Siswa SMA Lutfi Hidayati Fauziah	431
Perilaku Seksual Pranikah pada Siswa SMA R. Amirul Rasyied Yulianto	441
Gambaran <i>Sibling Relationship</i> pada Remaja yang Kembar Retnata Ofelia dan Liza Marini	452
Peran Keluarga dalam Pembentukan Moral Anak Safira Ainun Zahra	473

Normalisasi Korupsi: Tinjauan Psikologi

M. Untung Manara

Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang

muhammad.untung@unmer.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan suatu tindak yang sering sekali dianggap suatu tindakan yang sudah membudaya. Pandangan seperti ini membuat korupsi menjadi tindakan yang dianggap normal atau biasa. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana korupsi sebagai sebuah kejahatan menjadi normal atau dianggap suatu yang wajar. Kajian pustaka dilakukan dalam rangka menjelaskan permasalahan tersebut. Dari telaah teori-teori psikologi terkait dengan sikap dan perilaku dalam kelompok, ditemukan alur proses normalisasi korupsi pada suatu kelompok organisasi. Proses tersebut yaitu disonansi kognitif, rasionalisasi, *moral disengagement*, dan normalisasi (*divergent norm*). Bagaimana proses ini terjadi akan dibahas selanjutnya.

Kata kunci: normalisasi korupsi, disonansi kognitif, *moral disengagement*

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi permasalahan di berbagai negara terutama negara-negara berkembang. Di Indonesia korupsi merupakan masalah yang serius. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International (2014) menempatkan Indonesia di urutan 107 dari 175 negara-negara yang bersih dari korupsi. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia jauh berada di bawah, Singapura berada pada posisi sepuluh besar yaitu di urutan ketujuh, Malaysia berada di urutan kelima puluh, Philipina dan Thailand sama-sama berada di urutan 85 sebagai negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2015), terdapat 461 tindak pidana korupsi yang ditangani KPK selama rentang tahun 2004 hingga November 2015. Berdasarkan jenis perkara, kasus penyuapan merupakan kasus yang mendominasi tindak pidana korupsi yaitu

48% dari total keseluruhan kasus. Beberapa data di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih terkategori negara yang korup.

Korupsi berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dampak yang ditimbulkan bersifat masif, sehingga tindakan korupsi dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa setara dengan kejahatan pembunuhan massal. Korupsi berdampak pada masyarakat luas. Menurut Mauro (1995), korupsi berkorelasi dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan program kesejahteraan sosial. Korupsi menurunkan akses publik terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dampak sosial yang dimunculkan oleh korupsi antara lain buruknya layanan publik, terhambatnya pengentasan kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas (Kurniadi, 2011). Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 11,47% dari total seluruh penduduk (Badan Pusat Statistik, 2013). Dengan tingkat korupsi yang tinggi, maka upaya pengentasan kemiskinan akan sulit dilakukan.

Tingginya kasus korupsi dan buruknya dampak yang ditimbulkan menjadikan korupsi sebagai isu yang relevan untuk dikaji. Berbagai kajian telah dilakukan dalam rangka memahami korupsi dari berbagai sudut pandang. Budiman, Roan, dan Callan (2013) menjelaskan terdapat beberapa pendekatan yang sudah dilakukan dalam mengkaji korupsi. Pendekatan makroekonomi menjelaskan korupsi karena pengaruh aspek ekonomi seperti pendapatan perkapita, investasi dan tingkat kemiskinan (Lambsdorf, 1999). Pendekatan yang menekankan penyebab struktural seperti gaji yang rendah, kurangnya transparansi dan akuntabel, ketidakefisienan SDM. Adapun pendekatan individu menekankan pada faktor-faktor individual pelaku korupsi seperti faktor motivasi, nilai, dan sikap, dan kepercayaan (Rabl & Kuhlam, 2008).

Kajian korupsi dapat juga dibedakan berdasarkan tingkatannya, tingkat makro dan tingkat mikro. Pada tingkat makro, kajian korupsi cenderung fokus pada variabel-variabel lingkungan yang memicu tindakan korupsi. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan situasional dan organisasional. Kajian seperti ini misalnya dilakukan oleh Nieuwenboer dan Kaptein (2008) yang membahas proses pelembagaan korupsi di organisasi. Rabl (2011) meneliti faktor situasional yang berpengaruh pada tindakan korupsi seperti faktor tekanan, jumlah uang yang akan didapat dari korupsi, dan tingkat kesepakatan

[Type text]

pada korupsi pada organisasi. Trevino (1986) menyebutkan faktor-faktor situasi dan organisasi yang dapat berpengaruh pada korupsi antara lain struktur norma organisasi, model acuan, tingkat kepatuhan dan karakteristik kerja. Pendekatan tingkat mikro lebih menekankan pada faktor individual pelaku korupsi. Kajian pada level mikro atau pendekatan individual misalnya dilakukan oleh Rahmi dan Hidayat (2014) yang melihat peran kepribadian otoritarian dan kepuasan gaji terhadap tindak korupsi; Megawati dan Hidayat (2014) meneliti peran motivasi, persepsi birokrasi, dan altruisme terhadap kecenderungan korupsi; dan kajian lainnya seperti yang dilakukan oleh Sööt dan Rootalu (2012) serta Budiman, dkk., (2013).

Makalah ini akan mengkaji korupsi pada level individu dan organisasi. Proses normalisasi atau pelembagaan korupsi melibatkan faktor individu dan organisasi. Bagaimana proses normalisasi korupsi di organisasi atau kelompok merupakan pertanyaan yang akan dibahas dalam makalah ini.

Pembahasan

Perilaku korupsi merupakan perilaku individu yang terkait dengan orang lain. Dalam hal ini adalah organisasi tempat individu tersebut melakukan korupsi. Perilaku korupsi dapat dipandang sebagai patologi sosial, yaitu suatu tindakan individu atau sekelompok orang yang menyimpang dari norma sosial. Korupsi dalam masyarakat sosial dipandang sebagai suatu yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai sosial. Individu yang dibesarkan dengan norma-norma sosial yang berlaku umum tentunya akan memiliki sikap yang negatif terhadap tindakan korupsi. Sikap sendiri merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap suatu stimulus yang memunculkan perasaan suka atau tidak suka terhadap stimulus tersebut, dalam hal ini stimulus tersebut adalah tindakan korupsi.

Dalam kenyataannya sikap seseorang tidak selalu sesuai dengan perilakunya. Sebagai individu yang dibesarkan dengan norma yang melarang tindakan korupsi, seseorang yang pertama kali melakukan korupsi tentunya mempunyai sikap yang negatif terhadap korupsi, misalnya berpendapat bahwa hal tersebut dilarang menurut agama. Namun karena faktor kebutuhan dan

desakan lingkungan, seseorang dapat saja melakukan tindakan korup meskipun tidak sesuai dengan sikap yang dimiliki.

Disonansi Kognitif

Ketidaksesuaian antara sikap perilaku dapat memunculkan gejala disonansi kognitif, suatu perasaan tidak nyaman ketika sikap dan perilaku tidak sinkron atau dengan kata lain individu tersebut mengalami konflik batin (Walgito, 1999). Seorang koruptor ketika pertama kali melakukan tindakan ini tentunya akan mengalami gejala ini.

Disonansi kognitif merupakan suatu keadaan yang memunculkan ketidaknyamanan, kalau keadaan ini terus berlarut-larut, akan menyebabkan gejala-gejala klinis seperti stress hingga depresi. Namun individu yang digerakkan oleh motif *homeostasis* selalu mencari cara dalam rangka mengembalikan ketidaknyamanan yang dialami ke keadaan yang stabil dan nyaman. Paling tidak ada dua cara yang dilakukan individu untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh disonansi kognitif yaitu merubah sikapnya agar sesuai dengan perilaku atau sebaliknya merubah perilakunya agar sesuai dengan sikap yang dimiliki.

Sayangnya yang sering terjadi pada kebanyakan pelaku korupsi adalah cara yang pertama yaitu mengubah sikap agar sesuai dengan perilaku korupsi bukan malah sebaliknya. Hal ini bisa jadi dikarenakan sikap yang dimiliki tidak mengakar kuat dalam diri atau karena faktor tekanan lingkungan yang terlalu kuat. Individu yang tidak mempunyai sikap yang kuat akan mudah terpengaruh oleh lingkungan anggota organisasi lain yang telah menganggap korupsi sebagai tindakan yang dapat diterima.

Rasionalisasi

Salah satu tindakan yang dilakukan pelaku korupsi ketika merubah sikapnya agar sesuai dengan tindakan korupsi adalah melalui proses **rasionalisasi**. Rasionalisasi sendiri merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri manusia ketika mengalami tekanan secara psikis dengan cara merasionalisasi tindakan-tindakannya agar dapat diterima dan menganggap apa yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Dalam konteks korupsi,

[Type text]

rasionalisasi menolak interpretasi negatif dengan menganggap korupsi yang dilakukan dapat diterima atau dimaklumi. Budiman, Roan, dan Callan (2013) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk rasionalisasi yang sering ditemukan antara lain: pertama, menolak tanggung jawab, pelaku korupsi menganggap bahwa tindakan korupsi dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Tindakan korupsi dirasionalisasikan karena alasan gaji terlalu kecil. Kedua, penyangkalan terhadap dampak yang dimunculkan. Pada bentuk rasionalisasi ini, pelaku menganggap bahwa tindak korupsi yang dilakukan tidak akan terlalu berdampak kerugian pada orang lain ataupun negara, misalnya menganggap bahwa korupsi yang dilakukan kecil apabila dibandingkan dengan pejabat-pejabat lain. Ketiga, mempunyai tujuan yang ideal. Pada rasionalisasi ini, pelaku menganggap bahwa tindakan korupsi yang dilakukan dalam rangka tujuan yang lebih baik. Para pelaku membenarkan tindakan korupsi karena mempunyai tujuan lain di baliknya, misalnya tersangka korupsi menerima suap dalam rangka memenuhi desakan *stakeholder*.

Moral Disengagement

Dari proses-proses rasionalisasi ini kemudian berkembang norma-norma yang seolah mengabaikan norma yang berlaku di masyarakat luas. Apabila tindakan ini terus dilakukan individu akan mengalami apa yang disebut Bandura (1999) sebagai *moral disengagement*. *Moral disengagement* menjelaskan mengapa individu tertentu dapat melakukan tindakan-tindakan salah dan tidak manusiawi tanpa merasa bersalah. Proses ini dapat muncul dari proses rasionalisasi yang dijelaskan di atas. Rasionalisasi yang terus dilakukan berulang-ulang akan memunculkan norma tersendiri yang pada akhirnya merubah sikapnya. Pelaku tindakan korupsi pada titik ini tidak akan merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan.

Normalisasi/Divergent Norm

Pada level organisasi atau kelompok, individu-individu yang mengalami *moral disengagement* saling menguatkan satu sama lain. Dari praktek yang telah berulang-ulang dan kecenderungan kelompok atau individu di dalamnya untuk mempertahankan keuntungan dari perilaku ini, kemudian korupsi

cenderung dipelihara. Sehingga tindakan korupsi akan dipandang sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Pada titik inilah terjadinya proses **normalisasi korupsi**. Kemudian terjadi penyimpangan norma atau dengan kata lain normalisasi korupsi dalam suatu organisasi. Fenomena ini oleh Nieuwenboer dan Kaptein (2008) disebut sebagai *devergent norm* yaitu proses berkembangnya norma dalam suatu kelompok yang jauh dari norma yang diterima oleh masyarakat luas. Fenomena ini dapat kita lihat pada kelompok-kelompok seperti Nazi, gangster dan kelompok-kelompok teroris tertentu.

Tindakan ini bisa disebabkan karena kecenderungan kelompok untuk membedakan diri dari kelompok lainnya. Suatu organisasi misalnya ingin tampil sebagai kelompok yang mapan secara politik, dan mempunyai status sosial yang tinggi. Kecenderungan ini disebut dengan *positive distinctiveness*. Dengan segala tindakan kelompok mempertahankan superioritas dari kelompok saingan. Saingan antar kelompok ini kemudian juga meningkatkan kohesivitas internal kelompok. Hal ini pada akhirnya akan merasionalisasi tindakan-tindakan yang melanggar kekuasaan meskipun jauh dari norma sosial. Lebih jauh hal ini meningkatkan anggota kelompok teralienasi dari norma di luar kelompoknya. Anggota kelompok seolah menegasikan *feedback* negatif dari pihak luar dan cenderung mencari *feedback* yang sesuai dengan norma kelompoknya.

Pada tataran *divergent norm* inilah korupsi sulit untuk diberantas, karena masing-masing individu dalam kelompok organisasi saling melindungi dan saling menguatkan. Bahkan individu yang tidak melakukan korupsi akan dianggap sebagai individu yang melenceng dari kelompok. Pada tahapan ini individu yang sebelumnya jauh dari tindakan korupsi akan mengikuti pola yang ada di dalam kelompok organisasi. Teori identitas menjelaskan perilaku individu dalam kelompok. Dalam kelompok, individu akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan norma yang dianut oleh kelompok tersebut sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Fenomena ini disebut dengan depersonalisasi (Walgito, 1999) di mana seseorang individu mengalami perubahan pribadi ketika berada di dalam sebuah organisasi. Individu mempunyai kecenderungan untuk berperilaku dan mengadopsi norma dan kebiasaan di dalam suatu kelompok dan mengabaikan identitas pribadinya.

Kesimpulan

Terdapat beberapa tahap proses normalisasi korupsi sebagai suatu tindakan kejahatan. Pertama yaitu disonansi kognitif. Disonansi kognitif merupakan proses yang terjadi pada individu yang mengalami konflik batin karena ketidaksesuaian antara perilaku korupsi yang dilakukan dengan norma atau sikap yang dimiliki. Tahapan selanjutnya adalah individu melakukan proses rasionalisasi. Rasionalisasi dilakukan individu dalam rangka menyeimbangkan antara tindakan korupsi yang dilakukan dengan sikap. Berikutnya, apabila proses ini terus dilakukan maka individu akan mengalami *moral disengagement*. Pada tahap ini individu yang melakukan korupsi sudah tidak lagi merasa bersalah atas korupsi yang dilakukannya. Tahapan berikutnya terjadi pada tingkatan organisasi atau kelompok yaitu normalisasi atau *divergent norm*. Pada tataran kelompok, individu-individu dalam organisasi saling menguatkan atas tindakan korupsi yang mereka lakukan. Norma-norma dan budaya dari kumpulan orang yang sudah menanggap biasa tindakan korupsi kemudian menjadi norma dan budaya kelompok.

Daftar Pustaka

- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetuation of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review* 3, 193–209.
- Budiman, A., Roan, A., & Callan, V.J. (2013). Rationalizing ideologies, social identities and corruption among civil servants in Indonesia during the Suharto era. *J. Bus Ethics*, 116: 139 – 149.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Penanganan TPK berdasarkan jenis perkara*. Diunduh 4 Januari 2016 dari <http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara>.
- Kurniadi, Y. (2011). Dampak masif korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). *Pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi* (pp. 55-71). Jakarta: Kemendikbud.

- Lambsdorff, J., G. (1999). *Corruption in emperical research: A review*. Presented at 11th International Anti-Corruption Conference, in Durban, South Africa, Desember 10-15.
- Mauro, P. (1995). *Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper.
- Megawati, H. & Hidayat, R. (2014). *Persepsi birokratis, motivasi afiliasi dan altruisme sebagai faktor kecenderungan korupsi bermotif Prosocial*. Unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Nieuwenboer, N. A., & Kaptein, M. 2008. Spiraling down into corruption: A dynamic analysis of the social identity processes that cause corruption in organizations to grow. *Journal of Business Ethics*, 83, 133-146.
- Rabl, T. (2011). The impact of situational influences on corruption in organizations. *Journal of Business Ethics*, 100 (1), 85-101.
- Rabl, T., & Kühlmann, T.M. (2008). Understanding corruption in organizations: Development and empirical assessment of an action model. *Journal of Business Ethics*, 82 (2), 477-495.
- Rahmi, S, & Hidayat, R. (2014). *Pengaruh kepribadian otoritarian, kepuasan gaji dan budaya organisasi polisi terhadap tindak korupsi di lembaga kepolisian*. Unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Sööt, M.L. & Rootalu, K. (2012). Institutional trust and opinions of corruption. *Public Administration & Development*, 32 (1), 82-95.
- Transparency International. (2014). *Corruption perceptions index 2014*. Diunduh 28 Desember 2015 dari <https://www.transparency.org/whatwedo/>
- Trevino, L.K. (1986). Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. *Academy of Management Review*, 11 (3), 601-617.
- Walgito, B. (1999). *Psikologi sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Andi.